

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kejahatan yang dilakukan manusia semakin beragam di era globalisasi saat ini, termasuk masalah kejahatan transnasional seperti *human trafficking*, yang menjadi masalah besar terkait hak asasi manusia. Kejahatan ini meningkat di tingkat internasional dan menimbulkan ancaman bagi negara, regional, dan internasional. *Human trafficking* merupakan salah satu dari kejahatan terbesar di dunia yang memengaruhi ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun beberapa negara melarang hal ini, penegakan hukum yang tidak efektif membuat masalah ini tetap menjadi masalah di seluruh dunia.

Globalisasi mempermudah pergerakan orang, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi, dan meningkatkan risiko *human trafficking* melalui janji pekerjaan di luar negeri. Asia Tenggara sangat rentan terhadap *human trafficking* karena faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, konflik, dan kurangnya perlindungan hukum. Globalisasi mempercepat tren ini dengan memungkinkan pergerakan yang lebih mudah dan menciptakan ketidaksetaraan yang mendorong migrasi tenaga kerja, yang sering dieksploitasi. Sehingga, ASEAN berkomitmen memerangi *human trafficking* melalui kerangka hukum, kolaborasi internasional, dan peningkatan kesadaran publik. Dalam konteks SDGs, upaya ini tercermin dalam tujuan untuk mempromosikan masyarakat damai dan inklusif, mengurangi kekerasan, dan memperkuat akses keadilan.

Di Thailand permasalahan *human trafficking* menjadi isu yang cukup serius sehingga melalui rencana aksi dari *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* diharapkan mampu membantu agar dapat meminimalisir kasus *human trafficking* dinegara tersebut. Kerjasama *ASEAN Plan of Action* berfokus pada peningkatan kapasitas regional dan strategi pencegahan kejahatan lintas negara. Walaupun regulasi dan kerja sama regional telah diterapkan, masalah *human trafficking* tetap kompleks dan memerlukan upaya lebih lanjut dari ASEAN bersama negara-negara maju dan organisasi internasional. *Human trafficking* di Thailand, termasuk di bagian utara negara tersebut, merupakan masalah serius yang ditangani melalui reformasi hukum, penegakan hukum yang lebih ketat, perlindungan korban, dan pendidikan masyarakat.

Pemerintah Thailand bekerja sama dengan sektor swasta dan internasional untuk mencegah *human trafficking*, serta melindungi dan mendukung korban melalui kebijakan yang adil. Faktor-faktor kompleks seperti globalisasi, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran memperburuk masalah ini. Thailand terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kelompok yang rentan akan para *traffickers*, dan memperkuat pencegahan melalui regulasi baru dan kerja sama internasional. Budaya dan industri pariwisata juga berkontribusi pada tingginya tingkat *human trafficking* di Thailand. Pemerintah dan organisasi terkait mengambil langkah-langkah untuk mengelola industri pariwisata, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki ekonomi daerah miskin untuk mengurangi risiko *human trafficking*.

ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* berperan penting sebagai panduan bagi Thailand dan negara anggota ASEAN lainnya dalam merancang strategi efektif melawan *human trafficking*. Pemerintah Thailand juga fokus pada kolaborasi dengan NGO dan korban untuk meningkatkan kapabilitas dalam pencegahan, perlindungan, dan penuntutan kasus *human trafficking*. Dengan ekonomi yang berkembang pesat, Thailand menjadi tujuan utama bagi pekerja migran dan korban *human trafficking* dari negara-negara sekitarnya.

Untuk mengatasi *human trafficking*, Thailand telah menerapkan ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Di antara langkah-langkah ini adalah meningkatkan kerangka hukum, membangun dan menerapkan rencana aksi nasional, bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan membelanjakan uang untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum. Metode multifaset ini digunakan oleh Thailand untuk memenuhi janjinya di bawah Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah Kriminal Luar Negeri dan secara efektif menangani masalah *human trafficking*, baik di dalam negeri maupun di seluruh wilayah ASEAN.

Implementasi ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* oleh *Royal Thai Police* menunjukkan komitmen kuat terhadap penanggulangan kejahatan transnasional. Untuk bertukar informasi dan sumber daya, mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara anggota ASEAN dan organisasi internasional. Selain itu, *Royal Thai Police* aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan lintas batas melalui kampanye dan program pendidikan. Hubungan yang

erat antara *Royal Thai Police* dan ASEANAPOL juga terbukti efektif dalam melawan kejahatan lintas batas, termasuk *human trafficking* di wilayah ASEAN. Melalui partisipasi aktif dalam pertemuan tahunan ASEANAPOL, *Royal Thai Police* terlibat dalam pertukaran informasi penting mengenai kejahatan transnasional.

Selain itu, upaya mereka dalam menyelamatkan dan merehabilitasi korban *human trafficking* mencakup operasi penyelamatan, perlindungan sementara, bantuan awal, konseling jangka panjang, dan pelatihan untuk petugas, semua bertujuan untuk membantu korban memulai kembali kehidupan yang mandiri dan bermartabat setelah mengalami pengalaman traumatis. *Royal Thai Police* sangat penting dalam memerangi *human trafficking* di Thailand. Mereka bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk menghentikan, menyelidiki, dan menuntut pelaku pelecehan seksual serta menyelamatkan dan merehabilitasi korban. *Royal Thai Police* berkomitmen untuk melaksanakan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, yang merupakan instrumen hukum regional akan memerangi kejahatan lintas negara, termasuk *human trafficking*. Dilakukan oleh ASEANAPOL dan *Royal Thai Police*, dan menggunakan berbagai strategi dan upaya, termasuk bekerja sama dengan para lembaga penegak hukum negara lain.

Untuk berbagi informasi dan sumber daya dengan anggota ASEAN lainnya serta kelompok internasional. Selain itu, *Royal Thai Police* juga berusaha meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya kejahatan transnasional serta pentingnya kerja sama regional melalui program dan kampanye. Terdapat beberapa langkah serta inisiatif yang diambil oleh *Royal Thai Police* dalam menanggulangi *human trafficking* yakni berkolaborasi dengan berbagai entitas pemerintah dan internasional untuk menegakkan hukum yang ketat terhadap pelaku *human trafficking*. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti analisis data dan sistem informasi, juga sangat penting bagi *Royal Thai Police* dalam mendeteksi dan memantau jaringan *human trafficking*, membantu pengenalan pola dan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Royal Thai Police memiliki hubungan erat dengan ASEANAPOL dalam upaya memerangi kejahatan transnasional, termasuk *human trafficking*, di kawasan ASEAN. Mereka sering menghadiri pertemuan tahunan ASEANAPOL, yang diselenggarakan oleh para kepala kepolisian para negara anggota untuk membahas strategi penegakan

hukum regional dan masalah keamanan. Sebagai anggota ASEANAPOL, *Royal Thai Police* terlibat dalam pertukaran informasi dan intelijen terkait kejahatan transnasional, yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam operasi lintas negara dan penangkapan pelaku kejahatan. Mereka juga bekerja sama dengan kepolisian negara-negara ASEAN lainnya dalam operasi gabungan yang dikoordinasikan oleh ASEANAPOL.

Sangat penting untuk bekerja sama untuk memerangi *human trafficking* dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah ASEAN, khususnya Thailand. Keanggotaan dalam ASEANAPOL memperkuat hubungan antara *Royal Thai Police* dan badan penegak hukum lainnya di seluruh wilayah, yang sangat penting untuk memerangi kejahatan lintas negara. Dengan berbagi praktik terbaik dan standar regional, Kepolisian Thailand Utara dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi korban *human trafficking* di Thailand, menggunakan pendekatan yang berfokus pada korban dan berdasarkan informasi tentang trauma mereka.

Agar dapat memaksimalkan upaya dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pemerintah harus lebih fokus pada faktor dan upaya di negara mereka sendiri. Kepolisian Thailand Utara dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi korban *human trafficking* di Thailand dengan berbagi praktik terbaik dan standar regional. Pendekatan ini berfokus pada korban dan berdasarkan informasi tentang trauma yang mereka alami. Upaya penanggulangan *human trafficking* harus bersifat jangka panjang, baik melalui perundang-undangan dan perjanjian internasional, tindakan preventif melalui pendidikan dan pembangunan sosial ekonomi, maupun penyelamatan korban *human trafficking* melalui berbagai mekanisme. *Human trafficking* hanya dapat diberantas melalui upaya yang terkonsentrasi dan komunikasi lintas negara, tidak hanya dalam wilayah tertentu tetapi kerja sama dari semua organisasi dan negara dapat dikatakan wajib untuk mengatasi permasalahan ini.